



Evaluasi 2019 & Prediksi 2020  
**BIDANG POLITIK**  
Muchamad Yuliyanto

## Tahun Manuver dan Pragmatisme Politik

TAHUN 2019 bangsa Indonesia memiliki hajatan demokrasi lima tahunan, yakni pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Pergelaran tersebut didahului putaran siklus dalam demokrasi ketika kita mulai diwarnai mobokrasi lanjutan peristiwa 2018.

Yakni metode yang digunakan untuk menyelesaikan urusan publik melalui pengerahan massa secara besar-besaran dan berkelanjutan dalam rangka unjuk kekuatan.

Pada mobokrasi terdapat kekuasaan yang dibangun atas dukungan massa yang berkerumun dalam satu komando. Fungsinya untuk menekan dan melakukan *psywar* ketika menghadapi persoalan publik yang bakal menemui jalan terjal karena ketidakberimbangan posisi maupun macetnya lembaga politik formal, misalnya aksi damai 212, aksi buruh di Istana, dan aksi demonstrasi besar mahasiswa menyikapi revisi UU KPK.

Praktik demokrasi semacam ini wajar dan sah, namun yang lebih penting dapat dikelola dengan sikap inklusif, akomodatif, dan aspiratif serta tanpa kekerasan.

Selanjutnya dalam proses politik untuk membangun keyakinan publik yang dapat diorientasikan saat menghadapi pemilu sekaligus pilpres yang terpusat pada figur pasangan calon, maka terasa meningkatnya politik identitas sebagai nilai jualan dengan harapan dapat diterima dan dijadikan referensi pribadi saat menentukan pilihan dalam pilpres.

Identitas sebagai karakteristik yang bersifat personal dan bahkan menjadi penanda diri yang berkembang menjadi identitas sosial, memang merupakan entitas yang sensitif dan mudah diaduk-aduk yang bakal membangkitkan emosi pemilihnya.

Apalagi ketika identitas yang dieksploitasi masuk ranah SARA dan simbol kemajemukan lainnya.

Pemilu 2019 telah menunjukkan kedewasaan masyarakat ketika identitas yang dijadikan sarana eksploitasi untuk persuasi yang menimbulkan ketegangan relasi sosial, gagal memengaruhi perilaku politik yang mengarah pada konflik politik. Masyarakat menganggap dinamika politik tinggi saat

pemilu harus diakhiri dengan sikap demokratis, menerima secara terbuka dan dewasa hasil pilih-

komunikasi politik, untuk menyamakan kepentingan dan gerak langkah menuju kemenangan dalam pilpres.

Komunikasi tingkat tinggi antarelite politik terus berlangsung sebagai suguhan menarik atau justru membosankan di hadapan rakyat.

Pada akhirnya hanya *rematch* dari Pilpres 2014, cuma berganti pasangan. Namun demikian penuh manuver yang mengejutkan seperti menjelang penetapan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, demikan juga ketika muncul Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kedua, hasil pemilu legislatif juga banyak kejutan, ketika hasil survei berbagai lembaga tidak terbukti secara meyakinkan. Parpol yang diprediksi bakal hilang dari peredaran parlemen karena gagal memenuhi ambang batas justru berhasil masuk dengan perolehan meyakinkan, misalnya Nasdem, PKS, PAN, dan PPP.

Hal ini menandakan parpol "petahana" masih memiliki infrastruktur kemenangan yang terawat dan dikelola dengan baik. Sementara parpol baru atau lama yang tak terurus dengan baik dipastikan rontok dan tak dapat lolos ke Senayan, seperti Perindo, Partai Berkarya, PKPI, PBB dan Hanura. Ini membuktikan pemilih kita makin cermat dan tak mau coba-coba dalam memilih partai.

Ketiga, manuver yang dilakukan sekelompok orang melalui aksi kolosal menolak hasil pemilu di depan KPU yang berakhir rusuh dan kekerasan jelas telah menodai konsolidasi demokrasi yang diindikasikan dengan pemilu yang damai, demokratis, dan nirkonflik.

(Bersambung hlm 7 kol 1)



an rakyat tersebut. Sejak awal 2019, kehidupan bidang politik sarat manuver dari lembaga sampai perilaku politik, seperti dideskripsikan sebagai berikut:

Pertama, diskursus publik fokus pada figur pasangan calon yang bakal berlaga dalam pilpres. Koalisi parpol dibangun melalui kecanggihan ber-

### Tahun...

(Sambungan hlm 1)

Meski dapat diselesaikan berkat kesigapan aparat keamanan, namun tetap menjadi catatan. Karena itu kita makin membutuhkan pendidikan politik yang mendewasakan rakyat.

Keempat, pertunjukan manuver berikutnya men-jelang penyusunan Kabinet Indonesia Maju, beberapa hari setelah pelantikan presiden-wapres terpilih, begitu terlihat ajang silaturahmi dan komunikasi politik antarelite di luar prediksi publik. Misalnya langkah ketua umum parpol menemui presiden atau meng-galang dengan partai kompetitor pada pilpres.

Hal demikian dilakukan elite parpol untuk menunjukkan eksistensi, peran dan komitmen yang barangkali pernah disepakati atau sekadar "gertak sambal" kepada presiden terpilih. Parpol yang secara eksplisit tidak mendukung calon terpilih pun melakukan manuver tersebut, selalu dengan dalih klasik demi persatuan dan kepentingan bangsa.

Padahal sesungguhnya hal demikian melanggar asas kepatutan dalam etika politik. Sebab, etika politik menurut Karl Bertens (2004) mengajarkan asas kepatutan, kebenaran, konsistensi dan kehormatan dalam memperjuangkan kepentingannya. **Keuntungan Abadi**

Kelima, manuver politik paling mencengangkan publik ketika capres yang kalah dalam pilpres ikut safari politik menemui elite parpol pemenang guna memuluskan penyusunan kabinet yang sarat tarik ulur kepentingan. Sekali lagi, meski di luar kewajaran dalam fat-sun politik, namun tetap sah dilakukan apalagi demi menciptakan stabilitas dan mengembalikan integrasi sosial yang sempat mengkristal selama pilpres.

Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan sikap negarawan yang dibutuhkan negeri ini, atau sekadar memburu kekuasaan? Sejarah perjalanan ke depan yang bakal membuktikan. Atau juga memperkuat

asumsi yang muncul dengan pertanyaan untuk apa dis-elenggarakan pilpres jika pada akhirnya berkoalisi? Termasuk membenarkan adagium "tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik, yang abadi kepentingan-an itu sendiri".

Keenam, fenomena runtuhnya sikap dan motivasi "oposisi" loyal terhadap pemerintahan hasil pilpres merupakan perkembangan demokrasi yang mengkhawatirkan. Parpol masih banyak yang takut berada di luar pemerintahan, karena merasa harus puasa kekuasaan yang dapat dijadikan sumber daya dukungan parpol.

Dominasi satu kekuatan politik dan pemerintahan dan hampir tanpa oposisi sebagai penyeimbang, membuat pemerintahan cenderung minim kontrol, sekaligus berpotensi *abuse of power* baik secara kelompok maupun kelembagaan penyokong pemerintahan tersebut.

Ketujuh, susunan Kabinet Indonesia Maju yang didesain presiden memberi kesempatan berkiprah generasi milenial dengan argumen bakal lahir inovasi, kreasi dan kebijakan yang mengikuti perkembangan zaman. Di samping merupakan lompatan generasi yang bakal berada di era Indonesia emas 2045.

Terakhir, manuver DPR 2014-2019 di akhir masa tugas dengan merevisi UU KPK dinilai sebagai upaya mempreteli dan melemahkan KPK. Kemudian membangkitkan mahasiswa dari kalangan milenial yang selama dinilai apolitis dan apatis terhadap nasib bangsa dan negara.

Mereka bergerak dalam demonstrasi besar menolak revisi UU KPK dan mendesak presiden turun tangan mengatasi problem tersebut. Aksi parlemen jalanan membuat masyarakat menaruh harapan pada generasi milenial tetap bersikap nasionalis dan peduli bangsa. **Peran Media**

Pemilu serentak 2019 juga mengindikasikan posisi media, yakni (1) makin memperkuat peran media terutama TV dan media sosial yang dimanfaatkan *full po-wer* sebagai mesin untuk memenangi pilpres. Fenomena "kampret" dan "kecebong" jelas menunjukkan betapa strategis media sosial dan portal lembaga milik

para *buzzer* yang dijadikan sarana mendongkrak sekaligus menjatuhkan calon yang jadi objek pesan politik.

Bahkan opini dan orientasi seseorang begitu mudah dipandu dan dikendalikan media sosial, sementara penikmat media audiovisual sejak awal telah dicekoki terpaan media dengan agenda politik tertentu selama pilpres. Khalayak selaku konstituen makin sulit menemukan pilihan dengan argumentasi bijak dan komprehensif, karena isi pesan media penuh agenda politik partisipan pada pihak tertentu.

Akibatnya, muncul gejala *post truth* dalam memahami informasi dan kebenaran, termasuk dalam per-soalan politik. Perkembangan ini tidak mengarah pada kebaikan relasi media dengan khalayak di era demokrasi yang membutuhkan kedewasaan masyarakat. Walhasil, begitu urgen pendidikan melek media sosial dan informasi.

(2) Pesan politik yang berseliweran melalui media sosial selama 2019 dipenuhi ujaran kebencian, hoaks, berita palsu yang diproduksi sebagai bagian mesin pembentuk opini dan orientasi pandangan masyarakat yang berhubungan dengan politik dan kenegaraan.

Sebagian masyarakat bingung dan makin kecewa dengan peran media sosial dalam dinamika sosial dan politik. Barangkali kita mulai memasuki era distorsi media seiring perkembangan kebebasan.

Pada akhirnya diketahui bahwa perpolitikan kita sarat perilaku pragmatis, yang diekspresikan melalui berbagai manuver untuk mencapai kepentingan, di samping berbagai proses politik masih dalam frame materialisme yang berefek politik biaya tinggi. Ada yang tak kalah penting, kita menuntut tanggung jawab politik pada mereka yang menggeluti kebijakan dan pengurusan negara, untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Semoga saja! (19)

— Muchamad Yuliyanto, staf Pengajar FISIP Undip, Pengelola Lembaga Survei LPSI Semarang, Analis Politik dan Demokrasi Lokal